

**PENGARUH EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
TERHADAP KUALITAS KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT
(BPR) DI KOTA PATI**



SKRIPSI

Diajukan untuk sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

Oktaviana Linda Kumala Dewi

NIM. C2A607119

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2011

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Oktaviana Linda Kumala Dewi

Nomor Induk Mahasiswa : C2A607119

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/ Manajemen

Judul Skripsi : **PENGARUH EFEKTIVITAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP
KUALITAS KREDIT BANK
PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DI KOTA
PATI**

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H Sugeng Wahtudi, MM

Semarang, 18 Maret 2011

Dosen Pembimbing,

(Prof. Dr. H Sugeng Wahyudi, MM)

NIP.195109021981031002

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Oktaviana Linda Kumala Dewi
Nomor Induk Mahasiswa : C2A607119
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/ Manajemen

Judul Skripsi : **PENGARUH EFEKTIVITAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP
KUALITAS KREDIT BANK
PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DI KOTA
PATI**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal.....2011

Tim Penguji

1. Prof. Dr. H. Sugeng Wahyudi, MM (.....)

2. Prof. Dr. H. Suyudi Mangunwiharjo,MS. (.....)

3. Dra. Hj. Endang Tri Widyarti, MM. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya, Oktaviana Linda Kumala Dewi, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **“Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Pati”** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulisan lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, Maret 2011

Yang membuat pernyataan,

(Oktaviana Linda Kumala Dewi)

NIM. C2A60711

ABSTRACT

This research carried out in order to analyzed effectiveness influence of intern controlling system by using structure measurement tool that parted functional liability, authority system, healthy practice, and qialified employee to credit quality which measured by using NPL (non performing loan) value within BPR in Pati that already publicate on Bank Indonesia on 2008 – 2009 periods.

Sample used were about 12 BPR. Variable used within this research was structure that parted functional liability, authority system, healthy practice and qualified employee as the dependent and NPL (non performing loan) as independent variable. Data obtained from pubication of Bank Indonesia on 2008-2009 periods. Analysis technique used was double regression and hypothesis by using t test in order to analyzed partial regression coefficient and F-statistic to examine influence collectively by reliance level about 5%.

Result of hypphotesis examination within this research showed that effectiveness of Intern Controlling System were have negative and significant ifluence to both credit quality and NPL (non performing loan). Hypothesis effort given by:

H1a: Structure that parted functional liability have negative influence to NPL (non performing loan) means that when structure that parted functional liability more increasing therefore problem credit level will descending.

H1d: Qualified employee have negative influence to NPL (non performing loan) means that when qualified employee were increasing therefore problem credit or NPL (non performing loan) will descending.

Keywords: Intern Controlling System, Credit Quality

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh efektivitas sistem pengendalian intern dengan menggunakan alat ukur struktur yang memisahkan tanggung jawab fungsional, sistem wewenang, praktek yang sehat, dan karyawan yang berkualitas terhadap kualitas kredit yang diukur dengan menggunakan nilai NPL (*non performing loan*) pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Pati yang telah dipublikasikan di Bank Indonesia periode tahun 2008-2009.

Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 12 Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu struktur yang memisahkan tanggung jawab fungsional, sistem wewenang, praktek yang sehat, dan karyawan yang berkualitas sebagai variabel dependen dan NPL (*non performing loan*) sebagai variabel independen. Data diperoleh dari publikasi Bank Indonesia periode 2008-2009. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda dan uji hipotesis menggunakan t statistik untuk menguji koefisien regresi parsial serta F-statistik untuk menguji pengaruh secara bersama-sama dengan tingkat kepercayaan 5%.

Hasil dari pengujian hipotesis di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Sistem Pengendalian Intern berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas kredit atau NPL (*non performing loan*). Dukungan hipotesis disajikan pada :

H1a: Struktur yang memisahkan tanggung jawab fungsional berpengaruh negatif terhadap NPL (*non performing loan*) artinya apabila struktur yang memisahkan tanggung jawab fungsional semakin meningkat maka tingkat kredit bermasalah atau akan turun.

H1d: Karyawan yang berkualitas berpengaruh negatif terhadap NPL (*non performing loan*) artinya apabila karyawan yang berkualitas meningkat maka tingkat kredit bermasalah atau NPL (*non performing loan*) akan turun.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern, kualitas kredit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul “PENGARUH EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DI KOTA PATI” ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (SI) pada fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, dan saran dari semua pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. H. Mohamad Nasir, M.Si, Akt, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. H Sugeng Wahyudi, MM selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dengan sabar dan penuh ketlatenan membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Dra. Hj. Endang Tri Widyarti, MM selaku dosen wali.
4. Kedua orang tuaku yang sangat kuhormati dan kucintai, terimakasih atas doa, kasih sayang yang tulus, semangat dan dorongan baik moril maupun materiil hingga terselesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang yang telah mengajarkan dan membagikan ilmunya kepada penulis selama masa kuliah.

6. Seluruh staf dan karyawan fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama masa perkuliahan.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat berguna untuk menyempurnakan karya ini maupun sebagai bahan perbaikan bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, Maret 2011

Penulis.

Oktaviana Linda Kumala Dewi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah hendaklah kamu berharap"

(QS. Al-Mujadallah 11)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ *Ayah dan Ibu tercinta, atas doa dan kasih sayangnya.*
- ❖ *Adikku tersayang.*
- ❖ *Nenek dan kakekku tercinta.*
- ❖ *Kekasih hatiku yang selalu menghibur dan memberi semangat untukku.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori dan Penelitian terdahulu	12
2.1.1 Landasan Teori	12

2.1.1.1	Pengertian BPR	12
2.1.1.2	Tujuan dan Fungsi BPR	12
2.1.1.3	Pengendalian Intern	15
2.1.1.4	Sistem Pengendalian Intern	18
2.1.1.5	Kredit	25
2.2	Penelitian Terdahulu	32
2.3	Kerangka Pemikiran	36
2.4	Hipotesis	37
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	39
3.2	Jenis dan Desain Penelitian	40
3.3	Populasi dan Sampel Penelitian	41
3.4	Metode Pengumpulan Data	41
3.5	Sumber Data Penelitian	42
3.6	Metode Analisis Data	43
3.6.1	Analisis Deskriptif	44
3.6.2	Uji validitas dan Reliabilitas Data	45
3.7	Analisis Regresi	48
3.8	Uji Hipotesis	51
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN		
4.1	Uji Deskriptif	53
4.2	Validitas dan Reliabelitas	58
4.3	Uji Asumsi Klasik	60

4.4	Hasil Analisis Regresi.....	66
4.5	Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)	68
4.6	Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)	69
4.7	Koefesien Determinasi	71
4.8	Pembahasan	72
4.8.1	Hasil Uji Hipotesis	74
BAB V PENUTUP		
5.1	Simpulan	79
5.2	Keterbatasan Penelitian	80
5.3	Saran	81
DAFTAR PUSTAKA		83
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Nilai NPL pada BPR di Kota Pati 6
Tabel 2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu 34
Tabel 3.1	Variabel penelitian dan Skala Pengukurannya 39
Tabel 3.2	Nama BPR di Kota Pati 41
Tabel 3.3	Penentuan Kriteria Efektivitas SPI 45
Tabel 3.4	Indeks Reliabelitas dan Interpretasinya 48
Tabel 4.1	Hasil Deskriptif 55
Tabel 4.2	Hasil Uji Validitas Data..... 59
Tabel 4.3	Hasil Uji Reliabelitas Data 60
Tabel 4.4	Hasil Uji Normalitas Data dengan Kolmogorov-Smirnov 63
Tabel 4.5	Hasil Uji Multikolinieritas..... 64
Tabel 4.6	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 66
Tabel 4.7	Hasil Uji F Hitung terhadap Nilai NPL..... 68
Tabel 4.8	Hasil Uji Hipotesis Parsial 69
Tabel 4.9	Koefisien Determinasi Pada Uji Hipotesis I 71

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	37
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Data	62
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	65

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran A Surat Rekomendasi Ijin Penelitian
- Lampiran B Kuesioner untuk Responden
- Lampiran C Tabulasi Data
- Lampiran D Input Data
- Lampiran E Hasil Uji Reliabilitas Data
- Lampiran F Hasil Uji Validitas Data
- Lampiran G Hasil Uji Multikolinieritas
- Lampiran H Hasil Uji Heteroskedastisitas
- Lampiran I Hasil Uji Normalitas Data
- Lampiran J Hasil Uji Persamaan Regresi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan lajunya perkembangan dunia usaha dan majunya sebuah Negara, maka ditandai dengan meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat yang mengakibatkan kebutuhan permodalan. Bank sebagai lembaga keuangan diharapkan dapat menghimpun dana dari masyarakat untuk dipergunakan sebagai sumber modal dalam pembiayaan pembangunan. Bank merupakan perusahaan yang menyediakan jasa keuangan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Fungsi Bank merupakan perantara diantara masyarakat yang membutuhkan dana dengan masyarakat yang kelebihan dana (Kasmir, 2004).

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang bergerak maju dan saat ini sudah tergolong menjadi negara semi-industri, juga tidak mau ketinggalan dengan menggalakkan kegiatan usaha di semua sektor dalam mengantisipasi perkembangan dunia. Salah satu caranya yaitu dengan memberikan kemudahan-kemudahan kepada sektor-sektor yang membutuhkan dengan tujuan untuk merangsang percepatan perkembangan usaha. Transportasi dan komunikasi yang memadai yang kita rasakan saat ini merupakan sebagian efek tidak langsung yang kita rasakan karena adanya kemudahan tersebut.

Perbankan sebagai sektor vital dalam dunia usaha juga tidak luput mendapatkan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Salah satu kemudahan yang diberikan itu yaitu paket kebijakan pemerintah (deregulasi), yang bertujuan untuk memberikan kemudahan mendirikan bank-bank baru maupun perluasan dalam membuka cabang-cabang di daerah-daerah serta perubahan status dari bank pemerintah menjadi bentuk perusahaan perseroan.

Perubahan yang ditimbulkan oleh adanya kemudahan tersebut disatu sisi memang menguntungkan tapi disisi lain menjadikan persaingan antar bank menjadi lebih ketat. Sebuah bank tentu saja tidak mau kalah bersaing ataupun mengalami kemunduran yang berujung pada likuidasi atau kebangkrutan. Untuk menjaga dan menghindari agar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi, maka setiap bank berusaha membuat dan mengeluarkan ide-ide kreatif atau program-program andalan yang bertujuan untuk menarik minat masyarakat agar mau menyimpan dana sebanyak-banyaknya di bank mereka, yang kemudian digunakan untuk investasi dalam bentuk lain atau juga untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat lainnya.

Kegiatan utama bank sebagai lembaga keuangan salah satunya adalah memberikan kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Bila diamati dalam neraca maka perkreditan merupakan kelompok dari harta yang

mendominasi sisi aktiva dalam neraca. Dari segi pendapatan yang diperoleh, kegiatan perkreditan merupakan bagian dari pendapatan yang dominan.

Persaingan antar bank menjadi lebih ketat seperti sekarang ini dan kebutuhan penanaman modal semakin terasa. Sebagai pimpinan bank tentunya tidak ingin bank yang dipimpinya mengalami kemacetan. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, maka cara yang ditempuh adalah dengan menarik dana dari masyarakat dan kemudian diinvestasikan dalam bentuk lain. Investor tertarik dengan bank yang mempunyai perputaran uang yang stabil untuk itu bank berlomba-lomba menyalurkan kredit kepada masyarakat, namun seringkali bank mengalami kesulitan yaitu adanya tunggakan kredit atau biasa disebut sebagai kredit macet, artinya uang yang dipinjam mengalami kemacetan dalam penagihan sehingga likuiditas bank bisa terancam karena kredit yang macet. Untuk mencegah terjadinya kredit macet tersebut maka diperlukan pengamanan atau pembinaan terhadap kredit yang diberikan. Masalah-masalah yang dihadapi bank dalam pemberian kredit tidak hanya disebabkan oleh kelalaian saja, tetapi dapat juga disebabkan karena adanya penyelewengan yang dilakukan oleh pegawai bank yang bersangkutan. Oleh karena itu perlu didukung dengan pengendalian intern dalam pemberian kredit yang memadai.

Menurut Kasmir (2004) faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah meliputi lembaga keuangan itu sendiri dimana dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat dari kolusi pihak analisis kredit dengan pihak debitor sehingga dalam analisisnya dilakukan secara

subyektif. Selain lembaga keuangan itu sendiri, Pihak nasabah juga mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajiban kepada bank/ lembaga keuangan sehingga kredit yang diberikan macet dan adanya unsur tidak sengaja dimana debitor mau membayar akan tetapi tidak mampu. Misalnya kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, banjir dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Menurut Mulyadi (1993) Sistem Pengendalian Intern pada dasarnya merupakan struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data, dan mendorong efisiensi, serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Unsur-unsur dari sistem pengendalian intern adalah struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, sistem wewenang, praktik yang sehat dan karyawan yang berkualitas. Sebagaimana pernah dikemukakan oleh Boockholdt (1993), struktur pengendalian intern pada dasarnya terdiri atas berbagai kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Sistem pengendalian intern yang baik sangat diperlukan dalam melakukan aktivitas perbankan, dalam hal ini berfokus pada penyaluran kredit, dimana tolok ukur penyaluran kredit yang tepat kepada masyarakat, menjadi perhatian khusus pihak Bank. Untuk itu diperlukan suatu sistem pengendalian intern yang akan membantu mengendalikan dalam hal struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab secara tegas. Otoritas dan

prosedur pencatatan, praktik yang sehat dan karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Sejak dikeluarkannya Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang telah membagi Bank di Indonesia menjadi dua jenis yaitu: Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat pada khususnya telah semakin dikenal oleh masyarakat luas sebagai bank yang telah siap memberikan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Bank Perkreditan Rakyat tetap diharapkan mampu menghapus keberadaan pesaing ekonomi illegal seperti rentenir.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang serupa tentang efektivitas sistem pengendalian intern dan kualitas kredit telah dilakukan oleh Zaini Widya Ramdhani dan Sucipto (2009). Penelitian ini menekankan bahwa penilaian kualitas kredit pada umumnya dapat dilihat dari NPL (*Non Performing Loan*) atau sering di sebut kredit bermasalah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Medan Putri Hijau dapat meningkatkan kualitas kredit terbukti dari nilai kredit bermasalah (*non performing loans*) yang berada dibawah 5%.

Berikut disajikan data nilai NPL pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Pati periode tahun 2008-2009 yang terbagi menjadi 8 triwulan pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1**Nilai NPL pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Pati****periode tahun 2008-2009**

NO	NAMA BPR DI KOTA	NPL							
		2008				2009			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	BPR WEDARIJAKSA	5.14	5.48	4.43	5.62	5.61	5.32	6.16	5.56
2	PD BPR Bank Daerah Pati	1.06	0.76	1.54	1.71	1.98	1.83	1.74	1.25
3	PD BPR BKK Pati kota	17.51	18.56	19.29	19.25	17.05	19.16	21.44	20.36
4	PT BPE SUNGKUNANDHANA	0.78	0.75	0.38	0.34	0.29	0.36	0.48	0.53
5	PT BPR ARTA RINI	11.88	7.18	4.29	4.2	3.8	4.42	7.33	8.05
6	PT BPR ARTAPERDANA DELTA SENTOSA	15.87	16.55	19.66	13.98	17.64	21.43	17.29	13.39
7	PT BPR OERTAPERDANA	15.77	15.54	19.56	13.38	17.54	21.33	17.29	13.39
8	PT BPR ARTHA HUDA ABADI	3.34	3.26	3.23	3.38	3.7	4.07	4,00	3.96
9	PT BPR ASABAHANA SEJAHTERA	14.51	13.56	13.56	8.89	6.54	6.85	6.07	6.07
10	PT BPR JUWANA ARTHASURYA	39.33	34.55	44.27	42.62	39.96	57.11	55.33	60.57
11	PT BPR MITRA PATI MANDIRI	3.17	3.25	2.3	2.19	2.27	1.72	1.72	2.62
12	PT BPR TAYU DUTAPERSADA	0.56	1.23	0.12	0.17	0.09	0.07	0.34	0.17

Sumber: Publikasi Bank Indonesia periode 2008-2009

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui telah terjadi *fenomena gap* yaitu dari 12 BPR di kota Pati, terdapat 7 BPR yang memiliki nilai NPL lebih dari 5% yaitu (BPR WEDARIJAKSA, PD BPR BKK Pati kota, PT BPR ARTA RINI, PT BPR ARTAPERDANA DELTA SENTOSA, PT BPR OERTAPERDANA, PT BPR ASABAHANA SEJAHTERA, DAN PT BPR JUWANA ARTHASURYA) sebagian besar nilai NPL dari BPR di Kota Pati tahun 2008-2009 memiliki nilai NPL lebih besar dari 5%.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengambil judul :
 “PENGARUH EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

TERHADAP KUALITAS KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DI KOTA PATI'. Penelitian ini dilakukan pada BPR di Kota Pati karena dalam publikasi BI yang dapat dilihat dari tabel 1.1 mengenai nilai NPL BPR di Kota Pati tahun 2008-2009 nilai NPLnya rata-rata lebih dari 5%. Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang tindak lanjut pengawasan dan penetapan status bank pada pasal 2 ayat 2 bank yang dinilai memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) salah satunya adalah Bank yang memiliki kredit bermasalah (*non-performing loan*) secara neto lebih dari 5% (lima perseratus) dari total kredit. BPR di Kota Pati yang rata-rata memiliki NPL lebih dari 5% berarti termasuk bank yang memiliki potensi kesulitan likuiditas yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas telah terdapat *fenomena gap*. Yaitu nilai NPL di BPR kota Pati sebagian besar lebih dari 5%. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004, bank yang memiliki nilai NPL lebih dari 5% berarti termasuk bank yang memiliki potensi kesulitan likuiditas yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya. Berdasarkan rumusan masalah (*research problem*) di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh struktur yang memisahkan tanggungjawab fungsional sebagai efektivitas sistem pengendalian intern terhadap NPL di BPR Kota Pati?

2. Bagaimana pengaruh sistem wewenang sebagai efektivitas sistem pengendalian intern terhadap NPL di BPR Kota Pati?
3. Bagaimana pengaruh praktek yang sehat sebagai efektivitas sistem pengendalian intern terhadap NPL di BPR Kota Pati?
4. Bagaimana pengaruh karyawan yang berkualitas sebagai efektivitas sistem pengendalian intern terhadap NPL di BPR Kota Pati?
5. Bagaimana pengaruh efektifitas SPI secara simultan terhadap kualitas kredit BPR di Kota Pati?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah memberi jawaban atas pertanyaan penelitian yang ada, yang menjadi tujuan penelitian, antara lain:

- a. Untuk menganalisis pengaruh struktur yang memisahkan tanggungjawab fungsional sebagai efektivitas sistem pengendalian intern terhadap NPL di BPR Kota Pati.
- b. Untuk menganalisis pengaruh sistem wewenang sebagai efektivitas sistem pengendalian intern terhadap NPL (*non performing loan*) di BPR Kota Pati.
- c. Untuk menganalisis pengaruh praktek yang sehat sebagai efektivitas sistem pengendalian intern terhadap NPL (*non performing loan*) di BPR Kota Pati.
- d. Untuk menganalisis pengaruh karyawan yang berkualitas sebagai efektivitas sistem pengendalian intern terhadap NPL (*non performing loan*) di BPR Kota Pati.

- e. Untuk menganalisis pengaruh efektivitas sistem pengendalian intern (SPI) secara simultan terhadap kualitas kredit di BPR Kota Pati.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian diharapkan memiliki kegunaan bagi pihak lain. Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan wawasan kepada pembaca tentang wacana kualitas kredit yang diukur dengan menggunakan indikator NPL (*non performing loan*) serta permasalahannya.
- b. Bagi Perusahaan, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi tentang penerapan sistem pengendalian intern (SPI) dalam meningkatkan kualitas kredit, dan memberikan masukan dalam penerapan sistem pengendalian intern yang efektif di masa yang akan datang.
- c. Bagi Peneliti, dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kredit dan mengaplikasikan teori yang diperoleh di bangku kuliah dalam praktek.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian ini.

Penelitian ini dibagi menjadi lima bagian. Bab I adalah pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah yang mengemukakan tentang fenomena kualitas kredit dan Sistem Pengendalian Intern, alasan pemilihan topik, serta alasan pemilihan lokasi penelitian. Selanjutnya, bagian ini juga menjelaskan mengenai perumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian.

Bab II adalah Telaah pustaka, yang berisi tentang landasan teori dan penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini. Landasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori mengenai BPR, tujuan dan fungsi BPR, sistem pengendalian intern, struktur pengendalian intern, pengendalian intern, efektivitas sistem pengendalian intern, kredit, unsur-unsur kredit, fungsi kredit, klasifikasi kredit, dan pengendalian intern sebagai alat dalam meningkatkan kualitas kredit. Penelitian terdahulu tentang peranan lingkungan pengendalian terhadap pemberian Kredit, evaluasi efektivitas struktur pengendalian internal terhadap prosedur pemberian kredit Investasi, pengendalian internal sebagai alat Dalam meningkatkan kualitas kredit, dan pengaruh pemberian kredit terhadap NPL (*non performing loan*).

Bab III adalah metode penelitian, dimana menjelaskan tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, jenis dan desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dari awal penelitian.

Bab IV adalah hasil dan pembahasan dari penelitian yang mencakup deskripsi objek penelitian dan analisis data, serta pembahasan mengenai pengaruh efektivitas sistem pengendalian intern terhadap kualitas kredit.

Bab V adalah penutup yang memaparkan kesimpulan dari analisis pengaruh efektivitas pengendalian intern terhadap kualitas kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) periode 2008-2009 di Kota Pati yang telah dipublikasikan di Bank Indonesia. Selain itu, juga disertakan saran.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Landasan Teori

2.1.1.1 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan). Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat menurut Sukmadi (1994: 17) adalah bank sekunder yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa deposito berjangka atau tabungan serta pemberian kredit.

Dari beberapa pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank sekunder yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran tetapi berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa deposito berjangka atau tabungan serta pemberian kredit.

2.1.1.2 Tujuan dan Fungsi BPR

BPR berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dengan tujuan untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, penumbuhan ekonomi, dan stabilitas ke arah peningkatan kesejahteraan

rakyat banyak. Sasaran BPR adalah melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh ke tangan para pelepas uang (rentenir).

1. Tujuan BPR

BPR dalam rangka ikut membantu meningkatkan produktivitas dan penghasilan masyarakat terutama golongan ekonomi lemah, mempunyai beberapa tujuan dalam menjalankan usaha diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menunjang kelancaran penyediaan sarana produksi terutama permodalan dalam rangka pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan desa pada khususnya.
- b. Menciptakan pemerataan dalam kesempatan berusaha segolongan ekonomi lemah di pedesaan dan menciptakan lapangan kerja secara langsung.
- c. Meningkatkan produktifitas dalam rangka peningkatan produksi khususnya dibidang pertanian dan perdagangan.
- d. Melancarkan lalu lintas pembayaran dan pertukaran di desa.
- e. Meningkatkan pendapatan secara nyata bagi petani dan pedagang
- f. Meningkatkan taraf hidup dengan jalan:
 - 1) Memberikan perlindungan bagi pedagang kecil dan pertanian dari pengaruh yang merugikan.

- 2) Membentuk modal masyarakat dengan mengadakan pinjaman wajib
(Wahyudi, 1986).

2. Fungsi BPR

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan untuk mencapai tujuan tersebut diatas BPR juga menjalankan fungsinya sebagai berikut:

- a. Mendekatkan permodalan dengan sisten perkreditan yang mudah, murah dan mengarah pada masyarakat pedesaan.
- b. Menunjang kelancaran penyediaan sarana permodalan untuk kegiatan produktif.
- c. Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- d. Mendidik masyarakat pedesaan untuk gemar menabung.
- e. Melindungi masyarakat pedesaan dari pengaruh para lintah darat.
- f. Membimbing masyarakat pedesaan untuk lebih mengenal dan memahami asas-asas ekonomi nasional.
- g. Membimbing para nasabah atau pengusaha kecil untuk merasa ikut *handarbeni* atas lembaga perkreditan pedesaan yang ada.
- h. Untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemberian pinjaman kredit dibidang usahanya.

(Wahyudi, 1986).

2.1.1.3 Pengendalian Intern

Mulyadi & Kanaka P (1998) berpendapat bahwa pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut:

1. Keandalan pelaporan keuangan
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
3. Efektivitas dan efisiensi operasi

Menurut Theodorus M.Tuanakotta (1982), pengendalian intern adalah meliputi rencana dan semua metode kebijaksanaan yang terkordinasi dalam suatu perusahaan untuk mengamankan harta kekayaannya, menguji ketepatan dan sampai seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, manggalakkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijaksanaan yang telah digariskan.

Menurut AICPA yang diterjemahkan oleh Zaki Baridwan (1990), pengendalian intern meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, menjaga dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dulu.

Boockholdt (1993), mengemukakan struktur pengendalian intern pada dasarnya terdiri atas berbagai kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh

manajemen perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Menurut laporan COSO (Modern Auditing 2003) yang dijelaskan oleh P mengidentifikasi lima komponen pengendalian intern (*components of internal control*) yang saling berhubungan yaitu lingkungan pengendalian (*control environment*), penilaian resiko (*risk assessment*), aktivitas pengendalian (*control activities*), informasi dan komunikasi (*information and communication*), pemantauan (*monitoring*).

Salah satu komponen pengendalian intern yang dibahas disini adalah lingkungan pengendalian (*control environment*). Menurut Menurut Mulyadi (2001) lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan para pemilik dan manajer perusahaan mengenai pentingnya pengendalian intern perusahaan. Efektivitas unsur pengendalian intern sangat ditentukan oleh atmosfer yang diciptakan lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian mempunyai empat unsur, yaitu:

1. Filosofi dan gaya operasi, adalah seperangkat keyakinan dasar (*basic beliefs*) yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya. *Phylosophy* merupakan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dikerjakan oleh perusahaan. Gaya operasi mencerminkan ide manajer tentang bagaimana operasi suatu kesatuan usaha harus dilaksanakan.

2. Berfungsinya dewan komisaris dan komite pemeriksaan.

Dewan komisaris adalah wakil pemegang saham dalam perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas. Dewan berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi). Dewan komisaris

yang aktif menjalankan fungsinya dapat mencegah konsentrasi pengendalian yang terlalu banyak ditangan manajemen (direksi).

3. Metode pengendalian manajemen

Metode pengendalian manajemen merupakan metode perencanaan dan pengendalian alokasi sumber daya perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan dan pengendalian manajemen dilakukan melalui empat tahap :

- a. penyusunan program (rencana jangka panjang)
- b. penyusunan anggaran (rencana jangka panjang)
- c. pelaksanaan dan pengukuran dan
- d. pelaporan dan analisis

Proses manajemen perusahaan dimulai dengan perencanaan stratejik yang di dalamnya terjadi proses penetapan tujuan perusahaan dan penentuan strategi untuk mencapai tujuan tersebut dipilih, proses manajemen perusahaan kemudian diikuti dengan program-program untuk mencapai tujuan perusahaan yang ditetapkan dalam perencanaan stratejik.

Penyusunan program merupakan proses pengambilan keputusan mengenai program yang akan dilaksanakan oleh perusahaan dan penaksiran sumber yang dialokasikan kepada setiap program tersebut.

Proses penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses penetapan peran dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan. Dalam proses penyusunan anggaran ditetapkan siapa yang akan berperan dalam melaksanakan sebagai kegiatan pencapaian tujuan perusahaan dan ditetapkan pula sumber yang di

sediakan bagi pemegang peran tersebut, untuk memungkinkan ia melaksanakan perannya. Sumber ekonomi yang disediakan untuk memungkinkan manajer berperan dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan tersebut diukur dengan satuan moneter standar yang berupa informasi akuntansi.

4. Kesadaran pengendalian

Kesadaran pengendalian dapat tercermin dari reaksi yang ditunjukkan oleh manajemen dari berbagai jenjang organisasi atas kelemahan pengendalian yang ditunjuk oleh akuntan intern, atau akuntan publik. Jika manajemen segera melakukan tindakan koreksi atas temuan kelemahan pengendalian yang dikemukakan, hal ini merupakan petunjuk adanya komitmen manajemen terhadap penciptaan lingkungan pengendalian yang baik.

Menurut Mulyadi (1993) Tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengoperasikan pengendalian intern akuntansi yang baik dalam perusahaan adalah terletak ditangan manajemen puncak, karena dipundak merekalah tanggung jawab atas pengelolaan yang dipercayakan oleh pemilik terletak.

2.1.1.4 Sistem Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (1993) Sistem Pengendalian Intern pada dasarnya merupakan struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data, dan mendorong efisiensi, serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut Mulyadi (1993) Sistem Pengendalian Intern menurut tujuannya dapat dibagi menjadi dua macam: Pengendalian Intern akuntansi (*internal accounting*

control) dan pengendalian intern administratif (*internal administrative control*).

Pengendalian intern akuntansi ,yang merupakan bagian dari sistem pengendalian intern, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.Pengendalian intern administratif meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efesiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

Mulyadi (1993) menyebutkan rincian tujuan Sistem Pengendalian Intern akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kekayaan perusahaan
 - a. Penggunaan kekayaan hanya meliputi sistem otorisasi yang telah diterapkan
 - Pembatasan akses langsung terhadap kekayaan
 - Pembatasan akses tidak langsung terhadap kekayaan
 - b. Pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang dicatat dibandingkan secara periodik antara catatan akuntansi dengan kekayaan yang sesungguhnya
 - c. Rekonsiliasi antara akuntansi yang diselenggarakan
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
 - a. Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan
 - Pemberian otorisasi oleh pejabat yang berwenang
 - Pelaksanaan transaksi sesuai dengan otorisasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang

b. Pencatatan akuntansi yang terjadi dalam catatan akuntansi

- Pencatatan semua transaksi yang terjadi
- Transaksi dicatat dalam periode yang seharusnya
- Transaksi dicatat dan diringkas dengan teliti

Walaupun sistem pengendalian intern dirancang dengan baik, tetapi ada batas-batas tertentu yang tidak memungkinkan pengendalian yang ideal dapat tercapai.

Unsur-unsur Sistem pengendalian Intern menurut Mulyadi (1993) adalah

1. Struktur yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas.

Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggungjawab fungsional terhadap unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggungjawab fungsional dalam organisasi berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi operasi.
- b. Tidak satu departemenpun diberi tanggungjawab rangkap untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.

Adanya pemisahan fungsi operasi, penyimpanan dan akuntansi yang diselenggarakan dapat mencerminkan tanggung jawab sesungguhnya. Jika tidak diadakan pemisahan antara fungsi-fungsi tersebut maka data akuntansi yang dihasilkan tidak dapat dipercaya kebenarannya, dan sebagai akibatnya kekayaan organisasi tidak terjamin keamanannya.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya transaksi adalah perlu dibuat. Prosedur yang baik akan menjamin data yang akan direkam dalam formulir dicatat dalam catatan akuntansi dengan tingkat ketelitian dan reability yang tinggi. Hal ini akan menghasilkan informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, hutang, pendapatan dan biaya.

3. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi

Pembagian tanggungjawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara untuk menjanmin praktek-praktek yang sehat dalam pelaksanaannya, cara yang ditempuh adalah:

- a. Penggunaan formulir bernomor tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang.
- b. Pemeriksaan mendadak, dilakukan tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada yang diperiksa, dengan jadwal tidak teratur.
- c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu fungsi atau unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lain.

- d. Perputaran jabatan yang dilakukan secara rutin nantinya akan dapat menjaga independen pejabat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga persengkongkolan diantara mereka dapat dihindari.
 - e. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak.
 - f. Secara periodik dilakukan pencocokkan fisik kekayaan dengan catatannya.
 - g. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lain.
4. Karyawan yang kualitasnya sesuai dengan tanggungjawabnya.

Karyawan yang jujur dan ahli atau kompeten dalam bidang yang menjadi tanggungjawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efisien dan efektif. Meskipun hanya dengan sedikit elemen sistem pengendalian intern yang mendukungnya. Hal tersebut menunjukkan elemen karyawan yang berkualitas merupakan elemen sistem pengendalian yang sangat penting.

Untuk mendapatkan elemen yang kompeten dan dapat dipercaya, dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya :

- a. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaan yang dibutuhkan. Program yang baik dalam seleksi calon karyawan akan menjamin diperolehnya karyawan yang memiliki kompetensi yang dituntut oleh jabatan yang akan didudukinya.
- b. Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaan.

Adanya pengendalian intern diharapkan sedapat mungkin mencegah adanya penyelewengan atau penyimpangan lainnya dengan tindakan pengawasan dilakukan secara terus menerus baik melalui laporan maupun pemeriksaan fisik. Baik tidaknya informasi yang disajikan dalam laporan sangat ditentukan oleh baik tidaknya sistem pengendalian yang berlaku pada perusahaan yang bersangkutan. Sistem pengendalian intern yang lemah akan mengakibatkan kekayaan perusahaan tidak terjamin keamanannya. Kelemahan sistem pengendalian intern dalam perusahaan dapat dipecahkan dengan perancangan dan penerapan berbagai elemen sistem pengendalian intern.

Keterbatasan sistem pengendalian intern menurut Theodorus M. Tuanakotta (1982) adalah sebagai berikut :

1. Persekongkolan (*collution*)

Sistem yang bagaimana baiknya akan hancur oleh persekongkolan. Walaupun adanya pemisahan tugas seperti tercermin dalam rencana dan prosedur perusahaan merupakan tulisan diatas kertas belaka. Pengendalian intern mengusahakan agar persekongkolan dapat dihindari sejauh mungkin, akan tetapi pengendalian intern tidak dapat menjamin bahwa persekongkolan tidak terjadi.

2. Biaya

Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau ada kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Tujuan pengendalian intern bukanlah untuk sekedar pengendalian,

tetapi berguna untuk berlangsungnya usaha/tugas yang efisien dan mencegah tindakan yang dapat merugikan perusahaan, pengendalian juga harus mengendalikan hal tertentu mungkin melebihi kegunaannya.

3. Kelemahan manusia

Banyak kehancuran yang terjadi pada sistem pengendalian intern yang secara teoritis sudah baik. Karena pelaksanaannya adalah manusia yang mempunyai kelemahan misalnya orang-orang yang harus memeriksa apakah prosedur-prosedur tertentu sudah atau belum dilaksanakan, sering-sering membubuhkan tanda tangannya secara rutin dan otomatis, tanpa benar-benar melakukan penegasan. Kejadian-kejadian semacam ini cukup bagi orang yang membuat kecurangan dan untuk meneruskan kecurangan tersebut tanpa diketahui.

Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Efektivitas adalah kemampuan untuk melakukan hal yang tepat atau untuk menyesuaikan sesuatu dengan baik. Hal ini mencakup pemilihan sasaran yang paling tepat dan pemilihan metode yang sesuai untuk mencapai sasaran tersebut (Handoko, 1995:7). Menurut Amirullah dan Rindayah Hanafi (2002) yang dijelaskan oleh Budi Prijanto dan Dessy Puspitasari (2005)efektivitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara tepat. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan ukuran maupun standar yang berlaku mencerminkan suatu perusahaan tersebut telah memperlihatkan efektivitas operasionalnya.

2.1.1.5 Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu dari kata *credere* yang berarti percaya. Dengan demikian maka dasar pengertian dari istilah atau kosa kata “kredit” yaitu kepercayaan, sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan diantara para pihak, sepenuhnya harus juga didasari oleh adanya saling mempercayai, yaitu bahwa kreditur yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktu, maupun prestasi dan kontra prestasinya (Sudjana, 2000).

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.

Menurut Eric L. Kohler (1964), Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan dan ditanggung pada suatu jangka waktu yang disepakati.

Pengertian kredit menurut Teguh Pudjo Muljono (1989) Kredit adalah suatu penyertaan uang atau tagihan atau dapat juga barang yang menimbulkan tagihan tersebut pada pihak lain. Atau juga memberi pinjaman pada orang lain dengan harapan akan memperoleh suatu tambahan nilai dari pokok pinjaman tersebut yaitu berupa bunga sebagai pendapatan bagi pihak yang bersangkutan.

Menurut Sinungan (1995) Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak ke pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi kredit timbul sebagai akibat suatu pihak meminjam kepada pihak lain, baik itu berupa uang, barang dan sebagainya yang dapat menimbulkan tagihan bagi kreditur. Hal lain yang dapat menimbulkan transaksi kredit yaitu berupa kegiatan jual beli dimana pembayarannya akan ditangguhkan dalam suatu jangka waktu tertentu baik sebagian maupun seluruhnya. Kegiatan transaksi kredit tersebut diatas akan mendatangkan piutang atau tagihan bagi kreditur serta mendatangkan kewajiban untuk membayar bagi debitur.

Unsur-unsur kredit

Unsur-unsur yang terdapat pada transaksi kredit menurut Sinungan (1995) antara lain :

1. Kepercayaan

Kepercayaan adalah suatu keyakinan pemberi kredit bahwa prestasi (uang, jasa atau barang) yang diberikannya akan benar-benar diterimanya kembali di masa tertentu yang akan datang.

2. Waktu

Bahwa antara pemberian prestasi dan pengembaliannya dibatasi oleh suatu masa/waktu tertentu. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian

tentang nilai agio uang bahwa uang sekarang lebih bernilai dari uang di masa yang akan datang.

3. *Degree of Risk*

Pemberian kredit menimbulkan suatu tingkat resiko, di masa tenggang adalah masa yang abstrak. Risiko timbul bagi pemberi karena uang/jasa/barang yang berupa prestasi telah lepas kepada orang lain.

4. Prestasi

Prestasi yang diberikan adalah suatu prestasi yang dapat berupa barang, jasa atau uang. Dalam perkembangan perkreditan di alam modern ini maka yang dimaksudkan dengan prestasi dalam pemberian kredit adalah uang.

Fungsi Kredit

Adapun fungsi transaksi kredit dalam kehidupan perekonomian menurut Muchdarsyah Sinungan (1995) adalah sebagai berikut:

1. Kredit dapat meningkatkan utilitas (kegunaan) dari uang.

Keberadaan uang atau modal yang disimpan oleh para pemilik uang atau modal pada suatu lembaga keuangan (bank) atau sejenisnya, akan disalurkan oleh lembaga keuangan tersebut kepada sektor-sektor usaha produktif. Hal ini akan meningkatkan kegunaan uang tersebut, yang tadinya sebagai simpanan (tabungan dan deposito), kini dapat dijadikan modal untuk melaksanakan suatu usaha atau proyek.

2. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Melalui kredit, peredaran uang kartal maupun uang giral akan lebih berkembang karena kredit menciptakan mobilitas usaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

3. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.

Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha. Dengan adanya kredit, pihak peminjam atau yang diberi kredit akan bekerja semaksimal mungkin agar dari usaha yang dijalankannya dihasilkan keuntungan yang besar sehingga dapat melunasi kredit tersebut.

4. Kredit sebagai salah satu alat pengendali stabilitas moneter.

Kebijakan kredit bisa digunakan untuk menekan laju inflasi, yaitu dengan menyalurkan kredit hanya pada sektor-sektor usaha yang produktif dan sektor prioritas yang secara langsung berpengaruh pada hajat hidup masyarakat.

5. Kredit sebagai sarana peningkatan pendapatan nasional.

Dengan banyaknya pengusaha baik dari industri skala kecil maupun besar yang mendapatkan fasilitas kredit, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mereka dan secara nasional diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan nasional.

Klasifikasi Kredit

Keberadaan kredit menurut Muchdarsyah Sinungan (1991: 17) dapat digolongkan menurut beberapa klafikasi, antara lain :

1. Menurut jangka waktunya

Menurut jangka waktunya Menurut jangka waktunya kredit dapat digolongkan ke dalam beberapa klasifikasi, antara lain :

- a. Kredit Jangka Pendek (*Short-term loan*) yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari satu tahun. Misalnya kredit untuk membiayai kelancaran operasi perusahaan, termasuk didalamnya berupa kredit modal kerja. Kredit jangka pendek dapat di urutkan dalam tiga kelompok, antara lain Kredit dagang (*trade credit*) antar perusahaan, Pinjaman dari suatu perusahaan dagang, Surat dagang.
- b. Kredit jangka menengah (*Medium-term loan*) yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya satu sampai dengan tiga tahun. Biasanya kredit ini untuk menambah modal kerja, misalnya untuk membiayai pengadaan bahan baku. Kredit jangka menengah dapat pula dalam bentuk kredit investasi.
- c. Kredit jangka panjang (*Long-term loan*) yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya melebihi tiga tahun. Misalnya kredit investasi untuk membiayai suatu proyek dan perluasan usaha.

2. Menurut jaminannya

Menurut jaminannya kredit dapat diklasifikasikan menjadi :

- a. Kredit dengan jaminan (*Secured Loan*) yaitu kredit yang disertai penyerahan barang jaminan oleh nasabah. Jenis barang jaminan tersebut sangat tergantung pada jenis kredit yang diberikan. Misalnya kredit komersial untuk modal kerja, jaminannya dapat berupa persediaan. Kredit untuk pembelian mobil atau motor, jaminannya BPKB mobil atau motor tersebut.
 - b. Kredit tanpa jaminan (*Unsecured Loan*) yaitu kredit yang tidak disertai penyerahan barang jaminan dari nasabah. Jenis kredit ini tidak menggunakan jaminan dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk bonafiditas dan prospek usaha nasabah yang bersangkutan. Pemberian kredit tanpa jaminan ini dilakukan sepanjang prinsip-prinsip penilaian kredit lainnya telah terpenuhi menurut analisis kredit.
3. Menurut Tujuannya

Menurut tujuannya kredit dapat diklasifikasikan menjadi :

- a. Kredit Komersial (*Commercial Loan*) Yaitu kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah di bidang perdagangan. Kredit komersial antara lain meliputi kredit leveransir, kredit untuk usaha pertokoan, kredit ekspor dan lain-lain.
- b. Kredit Konsumtif (*Consumer Loan*) Yaitu kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif. Misalnya untuk membeli properti (rumah), mobil atau motor, barang elektronik dan berbagai barang konsumsi lainnya.

- c. Kredit Produktif (Productive Loan) Yaitu kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan dalam rangka membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehingga dapat memperlancar produksi. Misalnya kredit untuk pembelian bahan baku, pembayaran upah, biaya pengepakan, biaya pemasaran, biaya distribusi dan lain-lain.

4. Menurut penggunaannya

Menurut penggunaannya kredit dapat digolongkan menjadi :

- a. Kredit modal kerja Yaitu kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan untuk menambah modal kerja debitur, meliputi modal kerja untuk tujuan komersial, industri, kontraktor bangunan dan lain-lain.
- b. Kredit investasi Yaitu kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada perusahaan untuk digunakan dalam melakukan investasi melalui pembelian barang-barang modal.

Ramdhani dan Sucipto (2009) Kredit juga memiliki strategi yang dapat menyebabkan pengelolaan kredit menjadi sangat penting. Tujuan pengelolaan kredit adalah agar bank dapat meningkatkan kesehatan dan kinerjanya, dengan peningkatan kuantitas dan kualitas kredit. Kuantitas kredit dinilai dari jumlah dan tingkat pertumbuhan kredit yang disalurkan. Kualitas kredit, secara sederhana dan ringkas dapat diukur dari jumlah dan porsi kredit bermasalah (*non performing loans*). Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP Mei 1993 kualitas kredit untuk BPR dibagi menjadi 4 (empat) kriteria yaitu lancar (L), kurang lancar (KL), Diragukan (D) dan macet (M). dan menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang tindak lanjut pengawasan dan penetapan status bank

pada pasal 2 ayat 2 bank yang dinilai memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) salah satunya adalah Bank yang memiliki kredit bermasalah (*non-performing loan*) secara neto lebih dari 5% (lima perseratus) dari total kredit. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 tentang Pedoman Perhitungan Rasio Keuangan NPL dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total Kredit}}$$

Keterangan:

- Kredit merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain)
- Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
- Kredit bermasalah dihitung secara *gross* (tidak dikurangi PPAP)
- Angka dihitung per posisi (tidak disetahunkan)

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian seputar Sistem Pengendalian Intern telah banyak dilakukan dengan hasil kesimpulan yang berbeda-beda. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Pratiwi dan Syahelmi (2009) meneliti tentang peranan lingkungan pengendalian intern terhadap pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang putrid hijau Medan. Hasilnya menunjukkan bahwa

prosedur pemberian kredit oleh perusahaan sudah sangat baik, dimana prosedur pemberian kredit sangat sederhana, tidak berbelit-belit dan relatif singkat serta peranan lingkungan pengendalian terhadap pemberian kredit sangat berguna keberadaannya karena dapat meminimalisasikan tingkat penyelewengan dan penipuan yang akan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab.

Budi Prijanto dan Dessy Puspitasari (2005) meneliti tentang efektivitas struktur pengendalian internal terhadap prosedur pemberian kredit investasi, studi kasus pada PT. Bank Eksekutif Internasional (persero) tbk cabang Kelapa Gading. Hasilnya menunjukkan pengendalian internal terhadap prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Eksekutif Internasional (persero) tbk cabang Kelapa Gading dinilai baik, hal ini tercermin dari dengan ditetapkannya suatu pedoman sebagai suatu acuan bagi karyawan Bank Eksekutif dalam proses permohonan kredit, yang berisi serangkaian prosedur yang harus dilakukan dalam proses permohonan kredit calon nasabah.

Zaini widya ramdhani dan Sucipto (2009) meneliti tentang pengendalian internal sebagai alat dalam meningkatkan kualitas kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia tbk cabang Medan Putri Hijau. Hasil penelitian ini menunjukkan pengendalian internal kredit yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia tbk Cabang Medan Putri Hijau dapat meningkatkan kualitas kredit terbukti dari nilai kredit bermasalah (non performing loans) yang berada dibawah 5% .

Michael manove, A. Jorge padilla, dan Marco pagano (2001) meneliti penelitian yang berjudul *Collateral versus screening: a model of lazy banks*

dengan hasil penelitian bahwa strategi pemberian kredit berpengaruh positif terhadap NPL. Dimana dengan meningkatkan pemberian kredit murah kepada debitur maka akan menurunkan nilai NPL.

Jhony P.Chen (2003) meneliti penelitian yang berjudul *Non Performing Loan Securilization in the people's republic of China* dengan hasil penelitian bahwa strategi pemberian kredit berpengaruh negatif terhadap NPL (*Non Performing Loan*). Dimana strategi pemberian kredit yang baik dinilai mampu menurunkan nilai NPL dalam hal ini strategi pemberian kredit dan NPL (*Non Performing Loan*) memiliki arah yang berlawanan.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Pratiwi dan Syahelmi (2009)	Peranan Lingkungan Pengendalian Terhadap Pemberian Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Putri Hijau Medan	Dependen: Lingkungan pengendalian , Independen: pemberian kredit	Analisis Deskriptif	Peranan lingkungan pengendalian terhadap pemberian kredit sangat berguna keberadaannya karena dapat meminimalisasikan tingkat penyelewengan dan penipuan yang akan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Peranan lingkungan pengendalian terhadap pemberian kredit sudah berjalan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
					cukup efektif.
2	Prijanto dan Puspitasari (2005)	Evaluasi Efektivitas Struktur Pengendalian Internal Terhadap Prosedur Pemberian Kredit Investasi, Studi Kasus Pada: PT. Bank Eksekutif Internasional (Persero) Tbk Cabang Kelapa Gading	Dependen: Efektivitas struktur pengendalian intern, Independen: prosedur pemberian kredit investasi	Analisis Deskriptif	Pengendalian internal terhadap prosedur pemberian kredit investasi dinilai baik.
3	Ramadhani dan Sucipto (2009)	Pengendalian Internal Sebagai Alat Dalam Meningkatkan Kualitas Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Medan Putri Hijau	Dependen: Pengendalian internal Independen: kualitas kredit	Analisis Deskriptif	Pengendalian internal telah memenuhi ketentuan prosedur manajemen organisasi. Pengendalian internal yang diadopsi oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, cabang Medan Putri Hijau telah efektif untuk meminimalisir potensi kredit macet, hal ini terbukti dengan BDR dan NPL tahun 2006 dan 2007, berada di bawah 5%.
4	Michael Manove, A. Jorge	<i>Collateral versus screening</i> :	Dependen: Strategi Pemberian	Analisis Regresi	Strategi Pemberian Kredit berpengaruh positif terhadap <i>Non</i>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
	padilla, dan Marco Pagano, 2001	<i>a model of lazy banks</i>	Kredit. Independen: <i>Non Performing Loan</i>		<i>Performing Loan</i>
5	Jhony P. Chen, 2003	<i>Non Performing Loan Securilization in the People's Republic of China</i>	Dependen: Strategi Pemberian Kredit. Independen: <i>Non Performing Loan</i>	Analisis Deskriptif kualitatif	Strategi Pemberian Kredit berpengaruh negative terhadap <i>Non Performing Loan</i>

Sumber: Berbagai jurnal dan Penelitian terdahulu

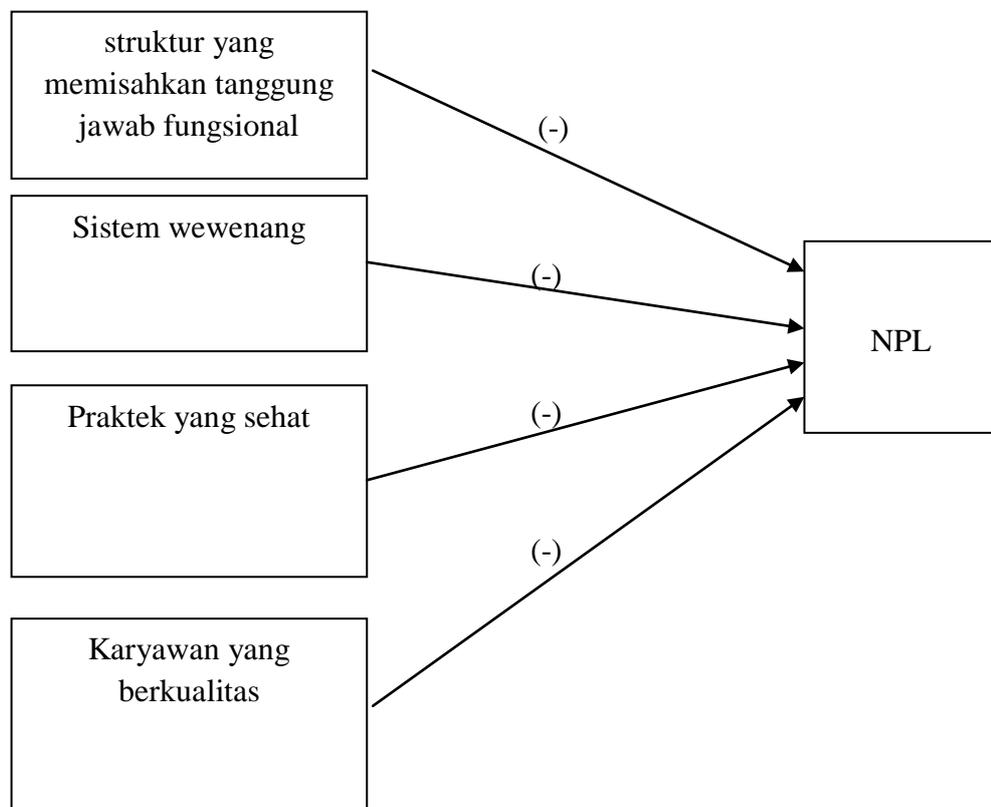
2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dari Mulyadi (1993) yang membagi unsur-unsur dari Sistem Pengendalian Intern yaitu struktur yang memisahkan tanggung jawab fungsional , sistem wewenang, praktek yang sehat, dan karyawan yang berkualitas, oleh karena itu dalam peneltian ini Sistem Pengendalian Intern diukur dengan menggunakan unsur-unsur yang disebutkan oleh Mulyadi (1993) yaitu struktur yang memisahkan tanggung jawab fungsional , sistem wewenang, praktek yang sehat, dan karyawan yang berkualitas .

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ramdhani dan Sucipto (2009) yang menyatakan bahwa kualitas kredit, secara sederhana dan ringkas dapat diukur dari jumlah dan porsi kredit bermasalah (*non performing loans*) oleh karena itu dalam penelitian ini kualitas kredit diukur dengan menggunakan NPL (*non performing loans*).

Gambar 2.1

Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (struktur yang memisahkan tanggung jawab fungsional, sistem wewenang, praktek yang sehat, dan karyawan yang berkualitas) terhadap Kualitas kredit (NPL)



Sumber: Mulyadi (1993), Ramdhani dan Sucipto (2009)

2.4 Hipotesis

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zaini widya Ramdhani dan Sucipto pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Medan Putri Hijau menyatakan bahwa pengendalian internal kredit yang dilakukan PT Bank

Rakyat Indonesia Tbk Cabang Medan Putri Hijau dapat meningkatkan kualitas kredit, terbukti dari nilai kredit bermasalah (*non performing loan*) yang berada dibawah 5% ini berarti apabila pengendalian interen baik maka akan menurunkan nilai kredit bermasalah (*non performing loan*). Dengan landasan teori tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

Hipotesis statistik:

H1 : Efektivitas Sistem Pengendalian Intern berpengaruh negatif terhadap kualitas kredit (NPL)

H1a: Struktur yang memisahkan tanggung jawab fungsional berpengaruh negatif terhadap NPL artinya apabila struktuktur yang memisahkan tanggung jawab fungsional semakin meningkat maka tingkat kredit bermasalah (NPL) akan turun.

H1b: Sistem wewenang berpengaruh negatif terhadap NPL artinya sistem wewenang semakin meningkat maka tingkat kredit bermasalah (NPL) akan turun.

H1c: Praktek yang sehat berpengaruh negatif terhadap NPL artinya pabila praktek yang sehat semakin meningkat maka tingkat kredit bermasalah (NPL) akan turun.

H1d: Karyawan yang berkualitas berpengaruh negatif terhadap NPL artinya apabila karyawan yang berkualitas meningkat maka tingkat kredit bermasalah (NPL) akan turun.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Ada 2 (dua) variabel penelitian yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu variabel efektivitas SPI sebagai variabel bebas (*independent variable*) dan kualitas kredit sebagai variabel terikat (*dependent variable*).

Tabel 3.1

Variabel penelitian dan Skala Pengukuran

No	Variabel	Definisi variable	Indikator	Skala Pengukuran
1	Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)	System yang mempunyai wawasan atau makna khusus yang berada dalam organisasi perusahaan yang terdiri dari kebijakan, teknik prosedur, alat-alat fisik, dokumentasi yang diarahkan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kehandalan data akuntansi, dan mendorong efisiensi	a. Struktur yang memisahkan tanggung jawab fungsional b. Sistem wewenang c. Praktek yang sehat d. Karyawan yang berkualitas	Skala pengukuran ordinal. Jawaban setiap item instrumen menggunakan skala <i>Likert</i> dengan lima alternatif jawaban yaitu 1. Sangat Tidak Setuju (STS), skor =5 2. Tidak Setuju (TS), skor = 4 3. Netral (N), skor = 3 4. Setuju (S), skor = 2

No	Variabel	Definisi variable	Indikator	Skala Pengukuran
				5. Sangat Setuju (SS), skor = 1
2	Kualitas Kredit	Kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan dan ditanggung pada suatu jangka waktu yang disepakati	NPL (<i>Non Performing Loan</i>) atau kredit bermasalah	Persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet) terhadap total kredit yang disalurkan bank

Sumber : landasan teori yang digunakan

3.2. Jenis dan Desain Penelitian

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil angket/kuesioner yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas sistem pengendalian intern terhadap kualitas kredit BPR di Kota Pati. Data sekunder diperoleh dari publikasi BI untuk laporan keuangan BPR di kota Pati periode tahun 2008-2009 yang terbagi menjadi 8 triwulan yang bertujuan untuk mengetahui nilai NPL yang digunakan untuk mengukur kualitas kredit BPR di Kota Pati 2008-2009.

3.3. Populasi dan Penentuan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik populasi, yaitu mengambil seluruh subyek penelitian. Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung atau pengukuran, kuantitatif dan kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya (Sudjana, 2000: 6). Populasi dalam penelitian ini meliputi semua BPR di Kota Pati yang terdaftar di BI periode 2008-2009 yang berjumlah 12 BPR .

Tabel 3.2
Bank Perkreditan Rakyat di Kota Pati

No.	Nama BPR
1	BPR WEDARIJAKSA
2	PD BPR Bank Daerah Pati
3	PD BPR BKK Pati kota
4	PT BPE SINGKUNANDHANA
5	PT BPR ARTA RINI
6	PT BPR ARTAPERDANA DELTA SENTOSA
7	PT BPR OERTAPERDANA
8	PT BPR ARTHA HUDA ABADI
9	PT BPR ASABAHANA SEJAHTERA
10	PT BPR JUWANA ARTHASURYA
11	PT BPR MITRA PATI MANDIRI
12	PT BPR TAYU DUTAPERSADA

Sumber: Publikasi BI

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data tentang efektivitas sistem pengendalian intern dan kualitas kredit, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Angket/ Kuesioner

Metode angket/kuesioner dalam penelitian adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Suharsimi, 1999). Metode angket dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkap variabel (X) yaitu efektivitas sistem pengendalian intern pada BPR Kota Pati.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu suatu usaha yang dilakukan dalam kajian untuk mengumpulkan data dengan cara menggunakan dokumen yang tersedia sebagai sumber informasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam penelitian ini metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari dokumen yang ada pada BPR Kota Pati berupa laporan keuangan tahun 2008-2009.

3. Metode Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pengurus/ manajer dan karyawan BPR. Metode wawancara digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari metode angket/ kuesioner dan metode dokumentasi.

3.5. Sumber Data Penelitian

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya yang diperoleh melalui wawancara atau hasil pengisian kuesioner.

2. Data Sekunder

Merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram (Umar, 2001: 69). Sumber data dalam penelitian ini adalah dokumentasi laporan keuangan tahun terakhir yaitu tahun 2008-2009 dan catatan dari perusahaan yang mendukung penelitian ini.

3.6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah cara-cara mengolah data yang telah terkumpul untuk kemudian dapat memberikan interpretasi. Hasil pengolahan data ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Ada beberapa teknik statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis data. Tujuan dari analisis data adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan yang terkandung di dalam data tersebut, dan menggunakan hasil analisis tersebut untuk memecahkan suatu masalah. Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, dan analisis regresi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel X (efektivitas SPI) terhadap variabel Y (kualitas kredit).

3.6.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dengan menggunakan metode Deskriptif Persentase (DP).

1. Efektivitas sistem pengendalian intern

Metode deskriptif (DP) digunakan untuk menggambarkan efektivitas pengendalian intern pengelolaan kualitas kredit BPR di Kota Semarang.

Perhitungan indeks persentase dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

n = Nilai masing-masing skor yang diperoleh (skor empirik)

N = Jumlah seluruh skor atau nilai (skor ideal)

% = Tingkat keberhasilan yang dicapai

(Ali, 1982)

2. Penafsiran terhadap analisis deskriptif

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a. Menentukan persentase maksimal yaitu 100%.
- b. Menentukan persentase minimal yaitu 0%.
- c. Menentukan rentang persentase (r %), diperoleh dari pengurangan persentase minimal terhadap persentase maksimal, maka didapatkan yaitu $100\% - 0\% = 100\%$.
- d. Menentukan interval kelas persentase, diperoleh dari pembagian criteria terhadap rentang persentase, maka didapatkan yaitu $100\% : 4 = 25\%$.

- e. Menetapkan kriteria, yaitu sangat efektif, efektif, kurang efektif, dan tidak efektif.

Tabel 3.3
Penentuan Kriteria Efektivitas SPI

No.	Rentang Persentase	Kriteria	Skala
1	75% - 100%	Sangat Efektif	4
2	50% - 75%	Efektif	3
3	25% - 50%	Kurang Efektif	2
4	0% - 25%	Tidak Efektif	1

(Muchsini, 1996)

3.6.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Data

Sebelum pengambilan data dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas terhadap daftar pertanyaan yang digunakan.

1. Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini digunakan untuk menguji kevalidan kuesioner. Validitas menunjukkan sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. (Azwar, 2003).

Teknik yang digunakan untuk menguji validitas kuesioner adalah berdasarkan Rumus *Koefisien Product Moment Pearson*, yaitu :

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{(\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{N})} \sqrt{(\sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{N})}}$$

Dimana :

r_{xy} : koefisien Korelasi Product Moment

X : nilai dari item (pertanyaan)

Y : nilai dari total item

N : banyaknya responden atau sampel penelitian (Azwar, 2003)

Perhitungan ini akan dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS (*Statistical Package for Social Science*). Untuk menentukan nomor-nomor item yang valid dan yang gugur, perlu dikonsultasikan dengan tabel *r product moment*. Kriteria penilaian uji validitas, adalah:

- Apabila $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ (pada taraf signifikansi 5%), maka dapat dikatakan item kuesioner tersebut valid.
- Apabila $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$ (pada taraf signifikansi 5%), maka dapat dikatakan item kuesioner tersebut tidak valid.

Menurut Azwar (2003), ada dua syarat penting yang berlaku pada sebuah angket, yaitu keharusan sebuah angket untuk valid dan reliabel. Suatu angket dikatakan valid jika pertanyaan pada suatu angket mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh angket tersebut. Sedangkan suatu angket dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten dari waktu ke waktu. Di mana validitas diukur dengan membandingkan r hasil dan r tabel (*r product moment*), jika

- $r \text{ hasil} > r \text{ tabel}$, data valid
- $r \text{ hasil} < r \text{ tabel}$, data tidak valid

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah suatu indeks yang menunjukkan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. (Azwar, 2003). Hasil pengukuran dapat dipercaya atau reliabel hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan

pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. (Azwar, 2003).

Cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner adalah dengan menggunakan Rumus Koefisien *Cronbach Alpha*: (Azwar, 2003)

$$\alpha = \frac{kr}{1 + \overbrace{(-r)}^r}$$

Dimana :

α = Koefisien *Cronbach Alpha*

k = Jumlah item valid

r = Rerata korelasi antar item

1 = Konstanta

Pengujian reliabilitas terhadap seluruh item atau pertanyaan pada penelitian ini akan menggunakan rumus koefisien Cronbach Alpha. Nilai Cronbach Alpha pada penelitian ini akan digunakan nilai 0.6 dengan asumsi bahwa daftar pertanyaan yang diuji akan dikatakan reliabel bila nilai Cronbach Alpha ≥ 0.6 (Ghozali, 2001).

Syarat suatu alat ukur menunjukkan kehandalan yang semakin tinggi adalah apabila koefisien reliabilitas (α) yang mendekati angka satu. Apabila koefisien alpha (α) lebih besar dari 0.6 maka alat ukur dianggap handal atau terdapat *internal consistency reliability* dan sebaliknya bila alpha lebih kecil dari 0.2 maka dianggap kurang handal atau tidak terdapat *internal consistency*

reliability. Tabel 3.2. berikut ini memberikan kriteria dalam melakukan interpretasi terhadap indeks reliabilitas.

Tabel 3.4
Indeks Reliabilitas dan Interpretasinya

Koefisien alpha (α)	Interpretasi
0.800 – 1.00	Sangat Tinggi
0.600 – 0.799	Tinggi
0.400 – 0.599	Cukup Tinggi
0.200 – 0.399	Rendah
< 0.200	Sangat Rendah

Sumber : Arikunto (1999)

3.7. Analisis Regresi

Dalam penelitian ini untuk mengolah data dari hasil penelitian ini dengan menggunakan Analisis Inferensial (kuantitatif). Dimana dalam analisis tersebut dengan menggunakan paket program SPSS. Analisis data dilakukan dengan bantuan Metode Regresi Linear Berganda, tetapi sebelum melakukan analisis regresi linear berganda digunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, dependent variable dan independent variable keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2001).

Mendeteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik *normal P-P Plot*. Adapun pengambilan keputusan didasarkan kepada:

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2001). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi adalah dengan menganalisa matrik korelasi variabel bebas jika terdapat korelasi antar variabel bebas yang cukup tinggi (lebih besar dari 0,90) hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas itu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi dengan residualnya, adapun dasar untuk menganalisisnya adalah :

- a. Jika ada pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

- b. Jika tidak ada pola yang serta titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Setelah melakukan uji asumsi klasik lalu menganalisis dengan metode regresi linear berganda dengan alasan variabel bebas terdiri dari beberapa variabel. Berdasarkan hubungan dua variabel yang dinyatakan dengan persamaan linear dapat digunakan untuk membuat prediksi (ramalan) tentang besarnya nilai Y (variabel dependen) berdasarkan nilai X tertentu (Variabel independent). Ramalan (prediksi) tersebut akan menjadi lebih baik bila kita tidak hanya memperhatikan satu variabel yang mempengaruhi (variabel independen) sehingga menggunakan analisis regresi linear berganda (Djarwanto, PS, 1985). Adapun bentuk persamaan regresi linear berganda yang digunakan dapat dirumuskan: (Gujarati, 1995)

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y : NPL

α : Koefisien konstanta.

β_1, \dots, β_4 : Koefisien variabel efektivitas sistem pengendalian intern

X1 : Struktur yang memisahkan tanggung jawab fungsional

X2 : Sistem wewenang

X3 : Praktek yang sehat

X4 : Karyawan yang berkualitas

e : faktor pengganggu

3.8. Uji Hipotesis

1. Pengujian secara parsial (Uji t)

Pengukuran uji t dimaksudkan untuk mempengaruhi apakah secara individu ada pengaruh antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat. Pengujian secara parsial untuk setiap koefisien regresi diuji untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel bebas dengan variabel terikat, dengan melihat tingkat signifikansi nilai t pada 5% rumus yang digunakan (Gujarati, 1995):

$$t_h = \frac{\beta_i}{S_e \beta_i}$$

Keterangan:

t_h : t hitung

β_i : parameter yang diestimasi

S_e : standar error

Pengujian setiap koefisien regresi dikatakan signifikan bila nilai mutlak $t_h > t_t$ maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternative (H_a) diterima, sebaliknya dikatakan tidak signifikan bila nilai $t_h < t_t$ maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternative (H_a) ditolak.

2. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinan (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa baik sampel menggunakan data (Gujarati, 1995). R^2 mengukur besarnya jumlah reduksi dalam variabel dependen yang diperoleh dari penggunaan variabel

bebas. R^2 mempunyai nilai antara 0 sampai 1, dengan nilai R^2 yang tinggi berkisar antar 0,7 sampai 1.

R^2 yang digunakan adalah nilai adjusted R^2 yang merupakan R^2 yang telah disesuaikan. Adjusted R^2 merupakan indikator untuk mengetahui pengaruh penambahan suatu variabel independen ke dalam persamaan.